



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) PEMERINTAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2021 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dipublikasikan melalui media cetak dan atau media elektronik. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan ringkasan LPPD Tahun 2021, berisi laporan kinerja Pemerintahan Kabupaten Wajo selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat (1), dan pasal 71 ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

I. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

a. Batas Administrasi Daerah

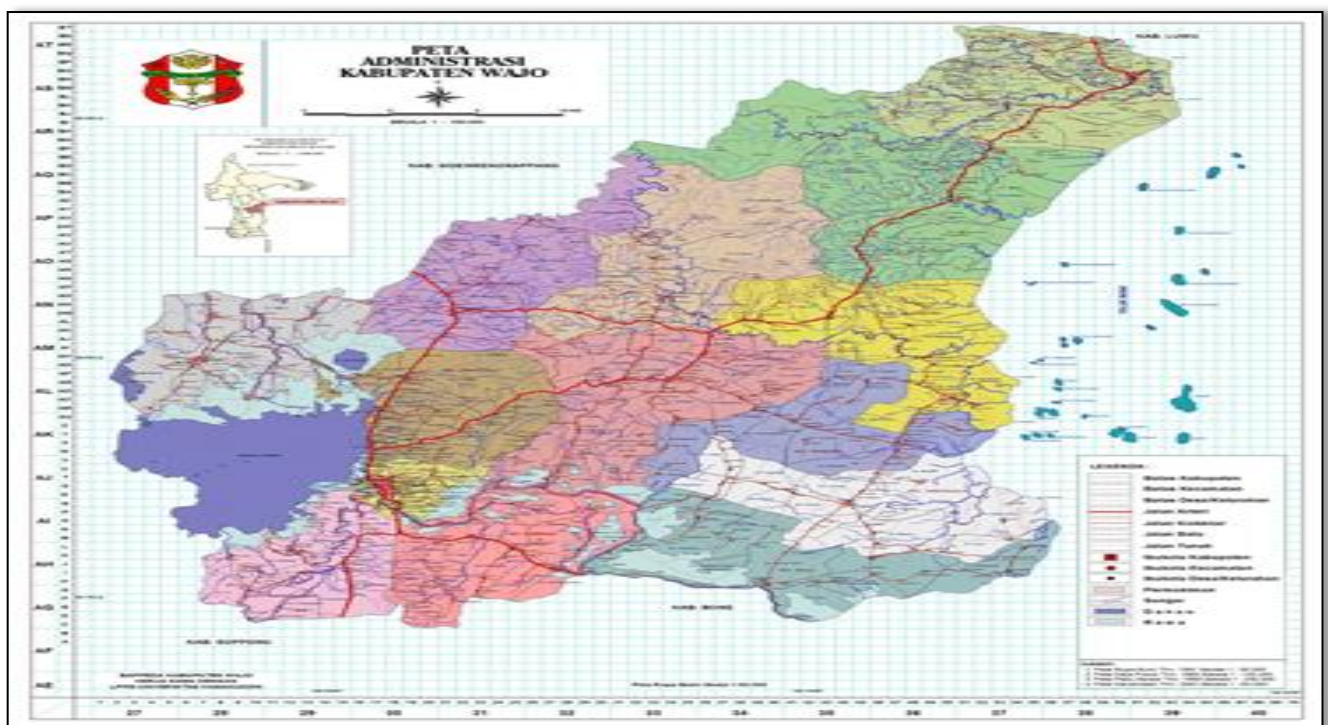
Kabupaten Wajo secara geografis adalah salah satu dari 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo, yang terletak pada posisi astronomis di koordinat antara 3°39' - 4°16' Lintang Selatan dan 119°53' - 120°27' Bujur Timur, dengan luas 2.506,19 km² atau 4,01 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo berada pada ketinggian 0 hingga 500 m di atas permukaan laut. Lahan berbukit terbentang dari selatan ke utara. Dataran rendah terletak di bagian timur, selatan, tengah, dan barat. Danau Tempe terletak di bagian barat sedangkan pesisir pantai membentang di sebelah timur menghadap Teluk Bone sepanjang 103 km garis pantai.

Batasan administrasi Kabupaten Wajo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Selatan : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap

Untuk lebih jelasnya mengenai administrasi Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar berikut.

Peta Administrasi Kabupaten Wajo



(Sumber : Bappeda Kabupaten Wajo, 2021)

Sedangkan secara geostrategis regional Pulau Sulawesi, maka Kabupaten Wajo yang berada pada bagian selatan merupakan daerah yang dilewati jalur transportasi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi strategis tersebut dapat membawa dampak bagi eksistensi Kabupaten

Wajo terhadap mobilitas baik barang/jasa maupun orang. Posisi Kabupaten Wajo dengan ibukotanya di Sengkang, merupakan daerah transit, dengan akses penghubung ke daerah-daerah lain yang berpusat pada wilayah strategis baik di Provinsi Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu, Kota Pare-pare, dan Kabupaten Toraja.

Kabupaten Wajo dalam konstelasinya dengan Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk bagian dari Kawasan Andalan Watampone dengan pusat pengembangan ditetapkan di Watampone. Selain itu, dalam kebijaksanaan penetapan kawasan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan kawasan Wajo sebagai kawasan pengembangan tanaman pangan dengan pusatnya di Kota Sengkang yang berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah pertanian.

b. Luas Wilayah

Kabupaten Wajo memiliki luas 2.506,19 km², yang meliputi 14 Kecamatan terdiri dari 190 desa/kelurahan dimana terdapat 48 Kelurahan dan 142 Desa. Adapun luasan wilayah administrasi Kabupaten Wajo menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas (km ²)	% Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Sabbangparu	132.75	5.3	12	3	15
2	Tempe	38.27	1.53	0	16	16
3	Pammana	162.1	6.47	14	2	16
4	Bola	220.13	8.78	10	1	11
5	Takkalalla	179.76	7.17	11	2	13
6	Sajoanging	167.01	6.66	6	3	9
7	Penrang	154.9	6.18	9	1	10
8	Majauleng	225.92	9.01	14	4	18
9	Tanasitolo	154.6	6.17	15	4	19
10	Belawa	172.3	6.88	6	3	9
11	Maniangpajo	175.96	7.02	5	3	8
12	Gilireng	147	5.87	8	1	9
13	Keera	368.36	14.7	9	1	10
14	Pitumpanua	207.13	8.26	23	4	27
Jumlah		2,506.19	100	142	48	190

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2020, BPS Kabupaten Wajo, 2021 (Diolah)

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Wajo sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, dimana jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 379.08 (ribu) jiwa meningkat menjadi 379,40 (ribu) jiwa pada tahun 2021. Pertumbuhan terbesar rerata jumlah penduduk kecamatan di Kabupaten Wajo tahun 2020 – 2021 pada Kecamatan Tempe sebesar 0,15% dan rerata laju pertumbuhan penduduk terendah di Kecamatan Belawa sebesar – 0,06 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan
Tahun 2020- 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan)		Rerata Laju Pertumbuhan 2020 -2021
		2020	2021	
1	Sabbangparu	24,37	24,38	0,09
2	Tempe	64,32	64,41	0,15
3	Pammana	30,71	30,73	0,08
4	Bola	19,44	19,45	0,08
5	Takkalalla	19,98	20,00	0,09
6	Sajoanging	17,53	17,54	0,08
7	Penrang	14,80	14,81	0,09
8	Majauleng	30,71	30,74	0,09
9	Tanasitolo	39,32	39,35	0,08
10	Belawa	30,15	30,17	0,06
11	Maniangpajo	15,76	15,77	0,08
12	Gilireng	10,88	10,89	0,11
13	Keera	20,24	20,25	0,08
14	Pitumpanua	40,88	40,91	0,09
Wajo		379,08	379,40	0,08

Sumber : *Wajo Dalam Angka 2021, BPS Kab. Wajo Tahun 2022*

Melihat pada tabel di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Kecamatan yang rerata laju pertumbuhan penduduknya kurang dari rerata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wajo 2020 - 2021 sebesar 0,06 %, yaitu Kecamatan Belawa.
- b. 7 (tujuh) Kecamatan yang rerata laju pertumbuhan penduduknya lebih besar dari rerata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wajo tahun 2020 - 2021 sebesar 0,09, 0,11 sampai 0,15 % yaitu Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Tempe, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Penrang, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Pitumpanua.

- c. Kepadatan penduduk Kabupaten Wajo tahun 2020 – 2021 senantiasa mengalami fluktuasi, dimana kepadatan penduduk di tahun 2020 sebesar 379.08 (ribu) jiwa/km², yang kemudian mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi sebesar 379.40 (ribu) jiwa/km².

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan kepadatan penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2020 – 2021 , dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Perkembangan Kepadatan Penduduk Kabupaten Wajo
Menurut Kecamatan Tahun 2020 – 2021**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Jumlah Penduduk (Jiwa/Km2)	
			2020	2021
1	Sabbangparu	132,75	183,54	183,68
2	Tempe	162,1	1.680,69	1.683,04
3	Pammana	179,76	189,46	189,59
4	Bola	167,01	88,29	88,35
5	Takkalalla	225,92	111,15	111,24
6	Sajoanging	38,27	104,93	105,01
7	Penrang	172,3	95,54	95,62
8	Majauleng	154,6	135,95	136,05
9	Tanasitolo	175,96	254,36	254,53
10	Belawa	207,13	175,00	175,09
11	Maniangpajo	220,13	89,58	89,64
12	Gilireng	154,9	73,98	74,05
13	Keera	147	54,94	54,98
14	Pitumpanua	368,36	197,35	197,51
Wajo		2.511,19	151,26	151,38

Sumber : Wajo Dalam Angka 2021, BPS Kab. Wajo Tahun 2022

Melihat pada tabel dan gambar di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepadatan penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2021 adalah sebesar 151,38 jiwa/km² dan terdapat 8 (delapan) Kecamatan yang kepadatan penduduknya lebih kecil dari kepadatan penduduk Kabupaten Wajo yaitu Kecamatan Bola dengan kepadatan 88,35 jiwa/km² , Kecamatan Takkalalla dengan kepadatan penduduk 111,24 jiwa/km², Kecamatan Sojoanging dengan kepadatan sebesar 105,01 jiwa/km², Kecamatan Penrang dengan kepadatan penduduk sebesar 95,62 jiwa/km² , Kecamatan Majauleng dengan kepadatan penduduk sebesar 136,05 jiwa/km², Kecamatan Maniangpajo dengan kepadatan 89,64 jiwa/km², Kecamatan Gilireng

dengan kepadatan 74,05 jiwa/km², dan Kecamatan Keera dengan kepadatan sebesar 54,98 jiwa/km²

- b. 6 (enam) kecamatan yang kepadatan penduduknya lebih besar dari kepadatan penduduk Kabupaten Wajo yaitu Kecamatan Sabbangparu 183,68 jiwa/km², Kecamatan Tempe dengan kepadatan penduduk sebesar 1.683,04 , Kecamatan Pammana dengan kepadatan penduduk sebesar 189,59 jiwa/km², Kecamatan Tanasitolo dengan kepadatan penduduk sebesar 254,53 jiwa/km², Kecamatan Belawa dengan kepadatan penduduk sebesar 175,09 jiwa/km², dan Kecamatan Pitumpanua dengan kepadatan penduduk sebesar 197,51 jiwa/km.

Selain jumlah penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Wajo dan perkembangan kepadatan penduduk berikut akan dijelaskan tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Wajo tahun 2021 yang terdiri dari 184.222 jiwa berjenis kelamin laki-laki atau 48,56%, dan 195.174 jiwa berjenis kelamin perempuan atau 51,44%. Hal ini menunjukkan bahwa *sex ratio* di Kabupaten Wajo sebesar 94%, yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 94 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk dan *sex ratio* Kabupaten Wajo tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.:

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
di Kabupaten Wajo Tahun 2020-2021**

No	Tahun	Jenis Kelamin				Jumlah	Sex Ratio
		Laki-Laki	%	Perempuan	%		
1	2020	184,047	48.55	195,032	51.45	379,079	94
2	2021	184,222	48.56	195,174	51.44	379,396	94

Sumber : Wajo Dalam Angka 2021, BPS Kabupaten Wajo, 2022

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Wajo tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk dengan kelompok umur 30-34 tahun mempunyai jumlah yang paling banyak diantara kelompok umur lainnya. Jumlah penduduk menurut kelompok umur 30-34 tahun mencapai 31.508 jiwa atau 8,305%. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Wajo pada tahun 2021 adalah 44,55%, yang berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif menanggung sebanyak 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Wajo tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wajo
Tahun 2020-2021**

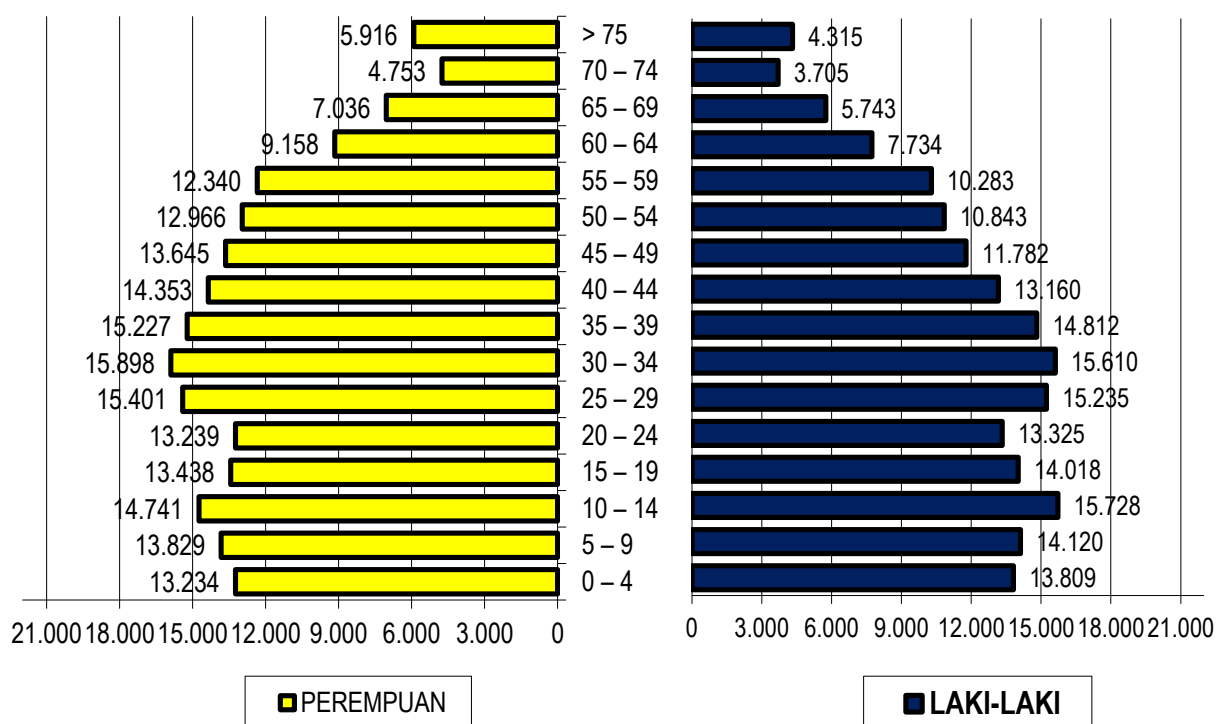
Kelompok Umur (Tahun)	2020		2021	
	Jenis Kelamin		Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
0 – 4	13,809	13,234	13,809	13,234
5 – 9	14,120	13,829	14,120	13,829
10 – 14	15,728	14,741	15,728	14,741
15 – 19	14,018	13,438	14,018	13,438
20 – 24	13,325	13,239	13,325	13,239
25 – 29	15,235	15,401	15,235	15,401
30 – 34	15,610	15,898	15,610	15,898
35 – 39	14,812	15,227	14,812	15,2a27
40 – 44	13,160	14,353	13,160	14,353
45 – 49	11,782	13,645	11,782	13,645
50 – 54	10,843	12,966	10,843	12,966
55 – 59	10,283	12,340	10,283	12,340
60 – 64	7,734	9,158	7,734	9,158
65 – 69	5,743	7,036	5,743	7,036
70 – 74	3,705	4,753	3,705	4,753
> 75	4,140	5,774	4,315	5,916
Jumlah	184,047	195,032	184,222	195,174

Sumber : Wajo Dalam Angka 2021, BPS Kabupaten Wajo, 2022

Berdasarkan analisa sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang dicirikan dengan tingginya angka kelahiran dan rendahnya angka kematian sehingga penduduk yang berumur muda mendominasi jumlah penduduk secara keseluruhan, maka penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2021 termasuk dalam kategori penduduk muda (expansive).

Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi penduduk Kabupaten Wajo menurut kelompok umur tahun 2021, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 1.1
Piramida Penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2021



Sumber : Wajo Dalam Angka 2021, BPS Kabupaten Wajo, 2022

III. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA MAKRO

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,15	69,62	0,68
2	Angka Kemiskinan	6,95	6,46	-7,05
3	Angka Pengangguran	4,33	4,32	-2,31
4	Pertumbuhan Ekonomi	- 1,17	6,77	678
5	Pendapatan Per Kapita	52,16	58,83	12,78
6	Ketimpangan Pendapatan	0,355	0,361	1,69

Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV, BPS 2022.

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Makro diatas dapat dijelaskan masing- masing indicator adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Menurut metodologi baru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui pendekatan tiga Dimensi dasar yaitu Dimensi kesehatan melalui Umur Harapan Hidup; Dimensi pendidikan yang terdiri dari *Harapan Lama Sekolah* dan *Rata- Rata Lama Sekolah*; dan Dimensi Hidup Layak yang dihitung dari *Pengeluaran per kapita Disesuaikan*.

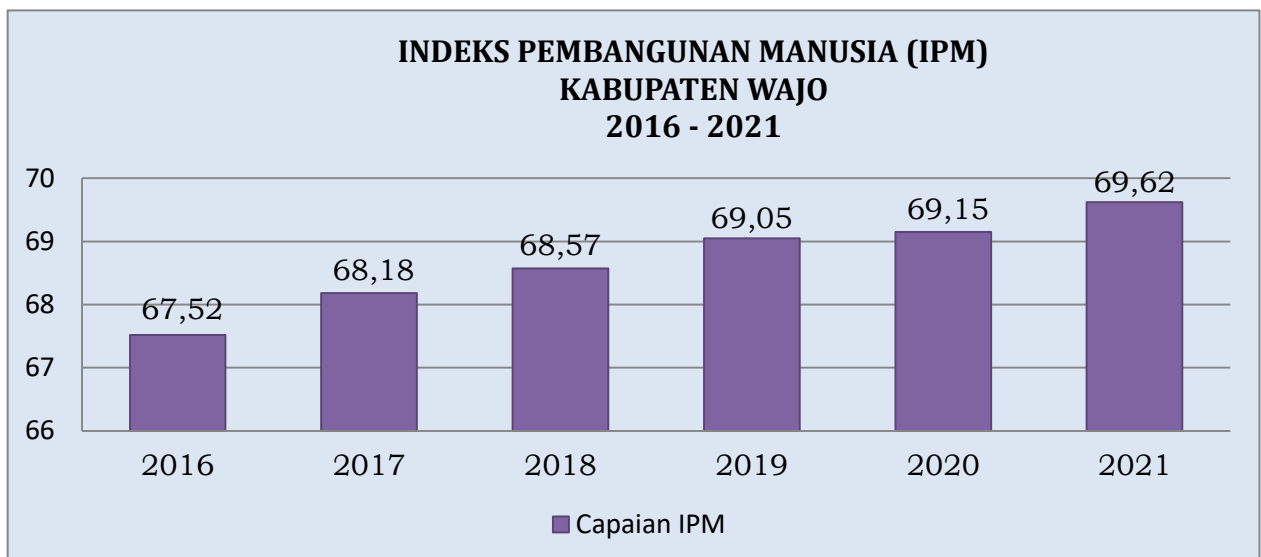
Berikut komponen pembentuk IPM kabupaten Wajo selama 2 (dua) tahun terakhir:

Komponen Pembentuk IPM

NO	KOMPONEN	2020	2021
1	Umur Harapan Hidup	67,35	67,48
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,14	13,15
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,81	7,05
4	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp)	12.386	12.505

Sumber :Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, BPS 2022

IPM Kabupaten Wajo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun laju pertumbuhannya berfluktuasi. Pada tahun 2021, nilai IPM sebesar 69,62. Nilai tersebut mengalami peningkatan 0,68 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 69,15. Pada saat ini IPM Kabupaten Wajo termasuk dalam kategori “sedang”, karena termasuk dalam *range* $60 \leq \text{IPM} < 70$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini tentang IPM Kabupaten wajo dari tahun 2016-2021.



Sumber : Wajo Dalam Angka Tahun 2021 BPS tahun 2022

2. Angka Kemiskinan

Dalam mengukur Angka kemiskinan dalam suatu kabupaten kota digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran dari perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Indikator Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Wajo 2020 – 2021

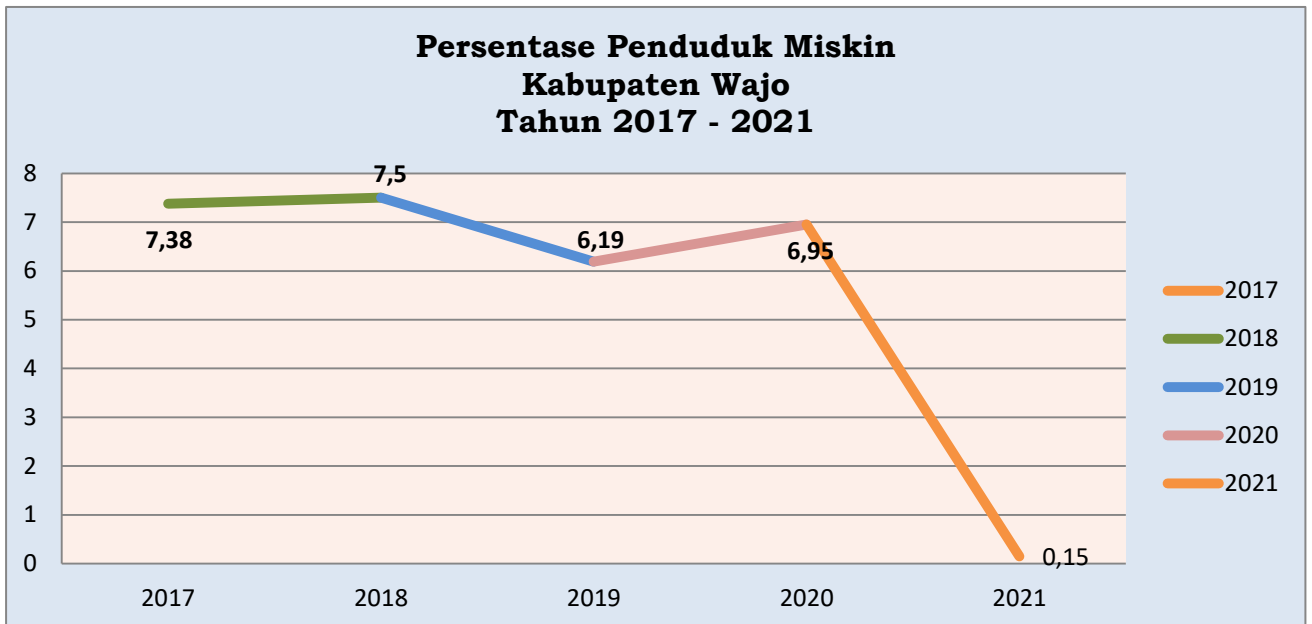
INDIKATOR	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	27,69	26,22
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,98	0,79
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.21	0.15
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,95	6,46
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	350.765	361.181

Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Sul-Sel Triwulan 4 2021, BPS 2022

Dari Tabel diatas dapat dilihat Garis Kemiskinan Kabupaten Wajo cenderung menurun selama periode 2020 – 2021. Salah satu penyebab kenaikan atau penurunan tersebut tentunya adalah adanya inflasi atau kenaikan harga barang barang pada beberapa kelompok komoditas.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada dalam 2 Tahun terakhir mengalami fluktuasi. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,98 di tahun 2020 sedangkan tahun 2021 menjadi 0,79. Nilai P1 yang menurun menunjukkan rata – rata pengeluaran penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan semakin mendekat. *Artinya, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.*

Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,21 pada tahun 2020, di tahun 2021 menurun menjadi 0,15. *Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menurun.* Untuk lebih jelasnya dapat dilihat persentase penduduk miskin Kabupaten Wajo dari tahun 2017-2021 berikut ini :



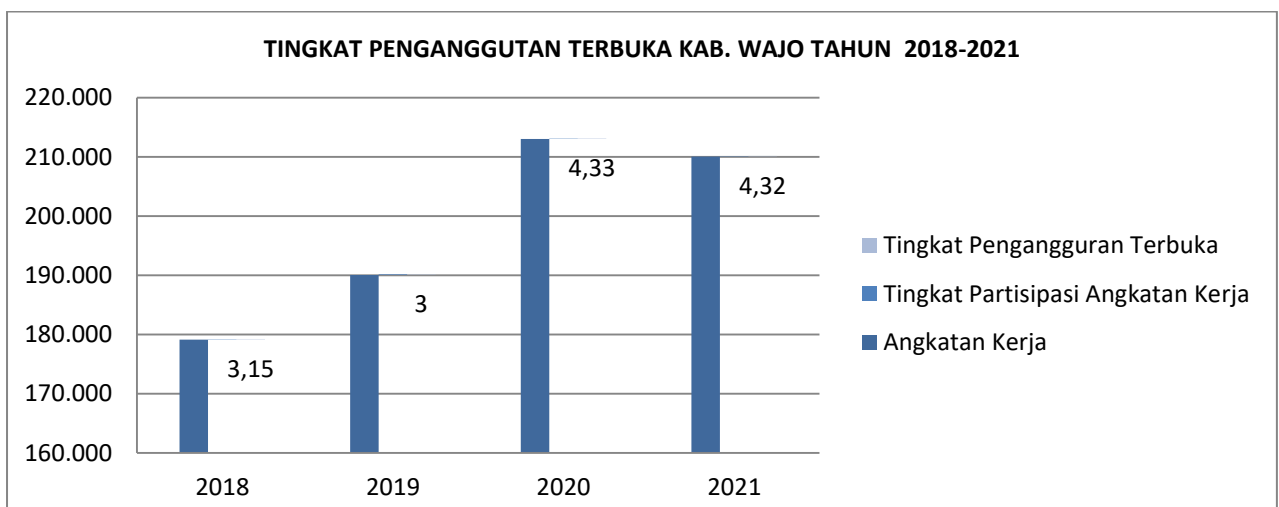
Sumber :-Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sulawesi Selatan, BPS 2022

3. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Pada Tahun 2021 angka pengangguran Terbuka pada Kabupaten Wajo cenderung menurun sebesar 0,0023% dari 4,33 pada tahun 2020 menjadi 4,32 pada Tahun 2021. Ini berarti terdapat 4,32 persen angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja di Kabupaten Wajo.

Peningkatan ini menunjukkan pula bahwa Kabupaten Wajo mulai bangkit setelah Pandemi Covid 19, dengan banyaknya bermunculan usaha wirusaha mikro dalam sektor penjualan makanan jadi dan jasa kurir yang menyerap angkatan kerja muda pada Kabupaten Wajo. Berikut adalah tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2018-2021.

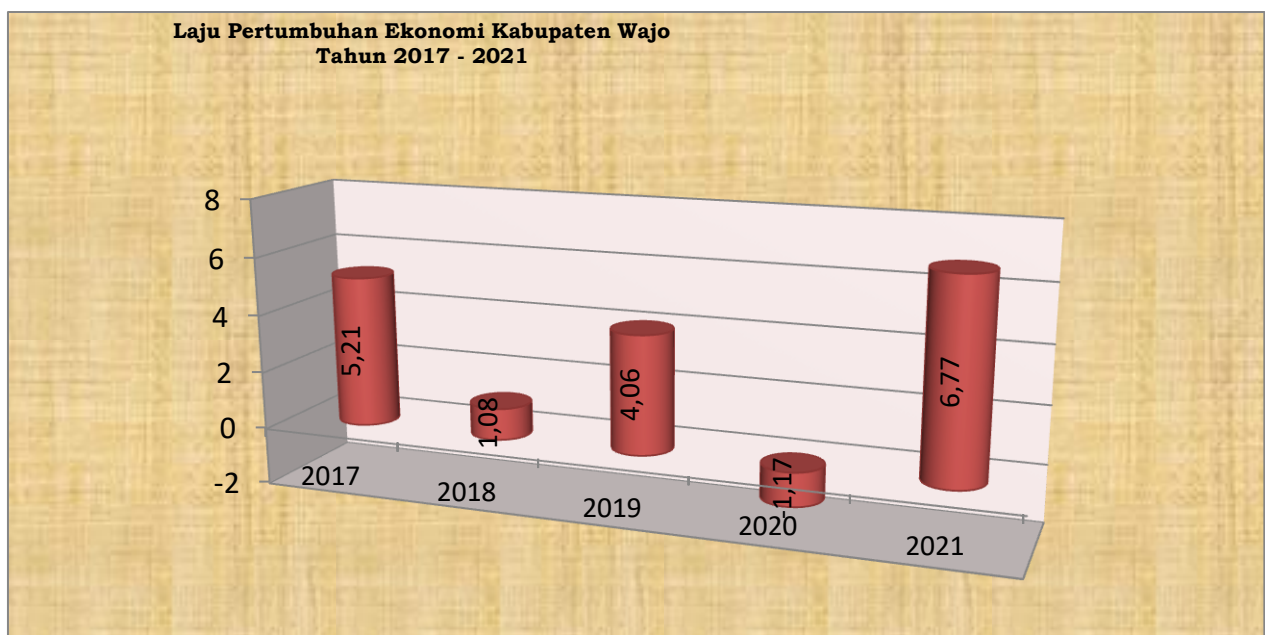


Sumber :-Wajo dalam angka 2021, BPS 2022

4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan Perkembangan produksi barang dan jasa suatu wilayah perekonomian dari tahun t-1 ke tahun t yang diukur berdasarkan pdrb atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi mengindikasikan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

Pertumbuhan yang positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo dimana pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kab. Wajo sebesar -1,17 persen, hal ini diakibatkan adanya Pandemi Covid 19 dimana beberapa lapangan usaha banyak yang tertutup akibat pemberlakuan pembatasan jam kerja, dan larangan menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan dll. dibanding dengan Tahun 2021 ini terjadi perkembangan sebesar 6,79% sehingga pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 mencapai angka 6,77 persen, dimana terjadi perkembangan pada beberapa sektor yaitu : Pertambangan dan Penggalian 11,44 %, Industri Pengolahan 4,97 %, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,74 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 12,42 %, dan Jasa Lainnya sebesar 6,85%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo dari tahun 2017-2021 berikut ini :

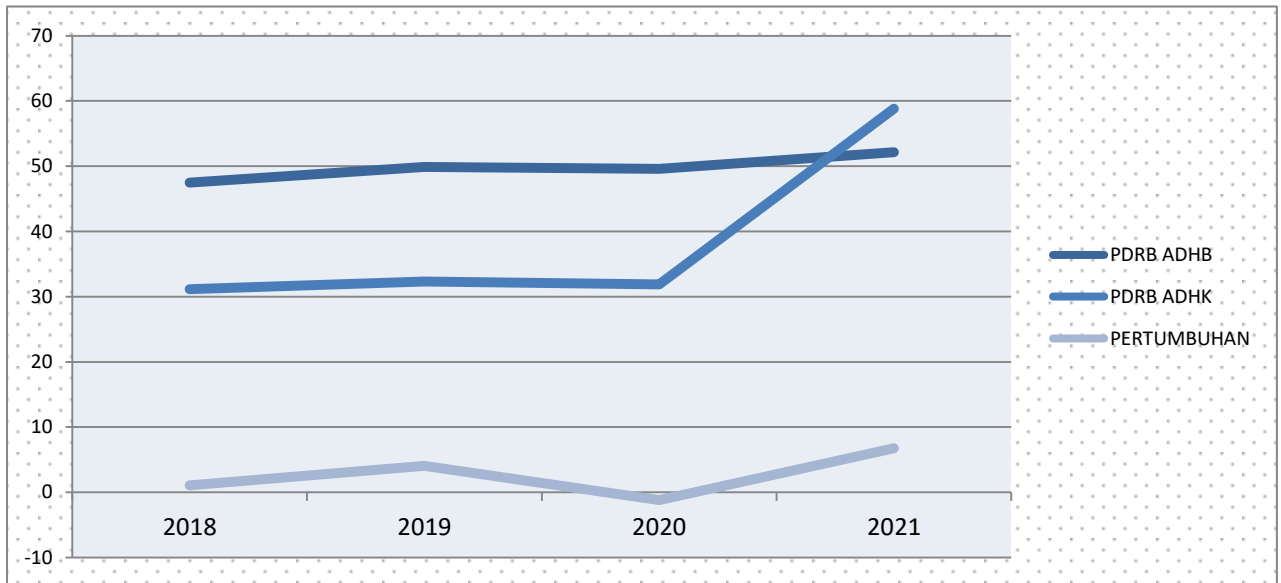


Sumber :-Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sulawesi Selatan, BPS 2022

5. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per Kapita diukur dari dihitung berdasarkan PDRB per kapita berdasarkan Harga Berlaku (ADHB) pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Dimana **PDRB per kapita** adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara **PDRB** dengan populasi di suatu wilayah

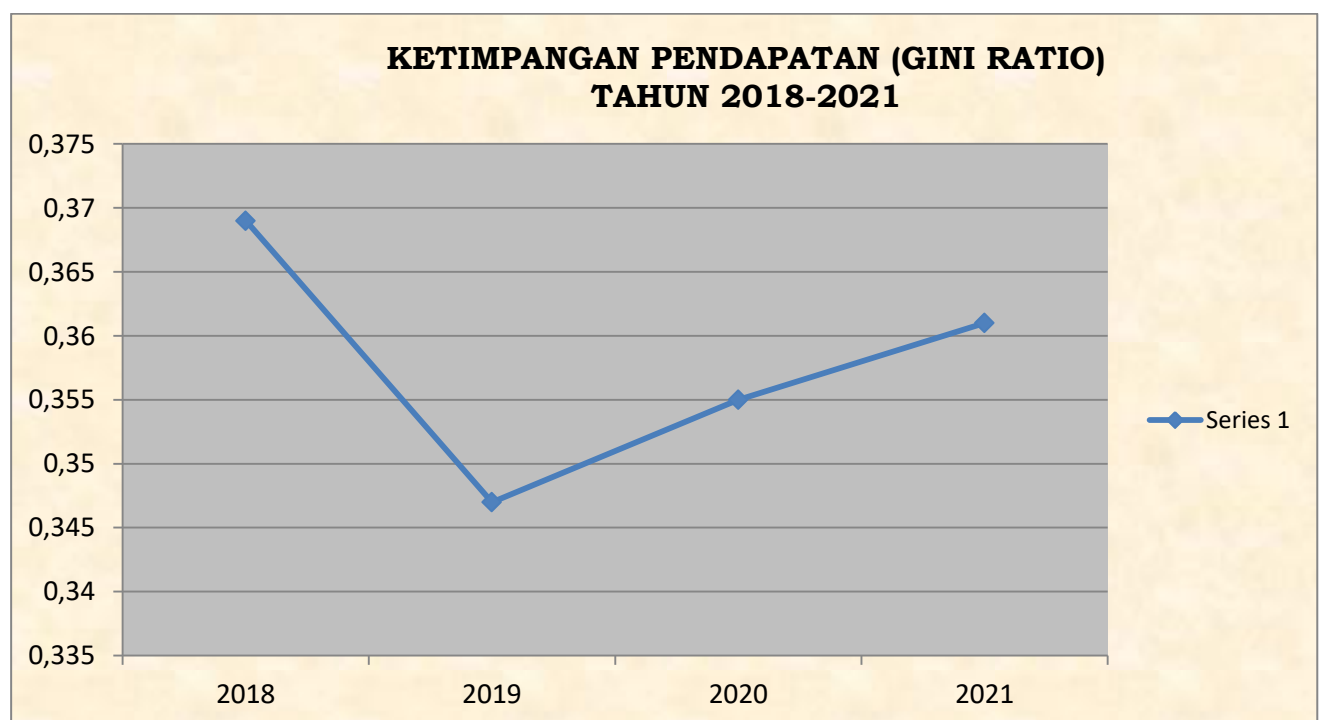
pada tahun tertentu. Pendapatan per Kapita Kabupaten Wajo cenderung meningkat sebesar 0,58 % dari 52,16 pada Tahun 2020 menjadi 58,83 pada Tahun 2021. Yang artinya dari sisi lapangan usaha 1 orang penduduk dapat menciptakan pendapatan sebesar 58,83 juta rupiah per tahun,



Sumber :-Wajo dalam angka 2021, BPS 2022

6. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu ukuran ketimpangan yang digunakan adalah Gini Ratio. Nilai ini berkisar antara 0 – 1, dimana semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik maka dapat dilihat pada Tahun 2020, Gini Ratio Kabupaten Wajo adalah sebesar 0,355. Angka ini turun sebesar 0,07 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2021 yang besarnya 0,361.



Sumber :-Wajo dalam angka 2021, BPS 2022

IV. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang yang telah beberapa kali diubah dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab serta asas dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menggerakkan fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain--lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan, terdiri dari Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); 3) Kelompok Lain--lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Untuk Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.

Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Wajo, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan, telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 yang merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Daerah Kabupaten Wajo.

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2021, disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Wajo yaitu meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber---sumber pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program penataan peraturan perundang--- undangan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Berikut merupakan ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah serta Realisasi Program Dan Kegiatan APBD Tahun 2021 Berdasarkan Urusan sebagaimana masing-masing table berikut ini:

1. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah.

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
A.	PENDAPATAN	1.471.383.401.992	1.455.466.128.748	98,92
1	Pendapatan Asli Daerah	139.542.879.049	150.055.636.566	107,5
2	Pendapatan Transfer	1.267.074.061.020	1.261.939.652.617	99,59
3	Pendapatan Lain	64.766.461.923	43.470.839.565	67,12
B.	BELANJA	1.588.623.204.604	1.465.628.502.837	92,26
1.	Belanja Tidak Langsung	879.790.995.443	850.366.663.570	96,66
2.	Belanja Tidak Langsung	708.832.209.161	615.261.839.267	86,80
C.	PEMBIAYAAN NETTO	117.239.802.612	94.340.529.982	80,47
1	Penerimaan	122.239.802.612	99.340.529.982	81,27
2	Pengeluaran	5.000.000.000	5.000.000.000	100

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan BPKP Kab. Wajo Tahun 2021

2. Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Urusan Wajib Terkit Dengan Pelayanan Dasar.

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
1.	Urusan Pendidikan	1.471.383.401.992	1.455.466.128.748	98,92
2.	Urusan Kesehatan	139.542.879.049	150.055.636.566	107,5
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.267.074.061.020	1.261.939.652.617	99,59
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	64.766.461.923	43.470.839.565	67,12
5.	Urusan Trantibunlinmas	1.588.623.204.604	1.465.628.502.837	92,26
6.	Urusan Sosial	879.790.995.443	850.366.663.570	96,66

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan BPKP Kab. Wajo Tahun 2021

V. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME).

URUSAN WAJIB TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR				
1 PENDIDIKAN				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	5.229	80,73%
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi bersangkutan	6.477	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	30.535	89.91%
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi bersangkutan	33.963	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	7.373	55,08%
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	13.213	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	111	67,89%
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	164	
2 KESEHATAN				
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota	333	8,78%
		Jumlah penduduk di kabupaten/kota	379.396	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	1	50%
		Jumlah RS di kabupaten/kota	2	

3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6.041	93,85%
		Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	6.437	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	5.768	100,38%
		Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	5.756	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	5.595	102,45%
		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	5.461	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	17.353	80,83%
		Jumlah balita di kabupaten/kota	21.469	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	49.241	99,54%
		Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	49471	
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	186.432	72,14%
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	258.432	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	42.052	55,85%
		Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	75.301	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	42.483	42,62%
		Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	99.676	

11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	6.095	69,27%
		Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	8.799	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	1.062	82,26%
		Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	1.291	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	7.380	100%
		Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	7.380	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	8.310	105,62%
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/ kota	7.868	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten /kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)		Kewenagannya diambil alih Provinsi
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Kewenagannya diambil alih Provinsi

2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	Kewenagannya diambil alih Provinsi	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasikan dan pelihara (ha)	3.875	70,66%
		luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota	5.483,94	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	93.566	87,26%
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	107.225	

5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	95.255	88,84%
		Jumlah rumah di kabupaten/ kota	107.225	
6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	276	100%
		Jumlah IMB yang berlaku	276	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	475,75	47,17%
		Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	1.008,6	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis	70	74,47
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	94	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Tidak proyek dengan pengawasan terjadi kecelakaan konstruksi di tahun 2021	
		jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		
4	PERUMAHAN RAKYAT			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	5	26,30%
		jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2019	1.901	

2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	132	7,03%
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	1.879	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	0,416	20,75%
		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	200,46	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	4.841	4,51%
		Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	107.225	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	778	14,21%
		Jumlah unit perumahan kabupaten/kota	5.461	
5	TRANTIBUMLINMAS			
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	40	100%
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	40	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	13	20%
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	65	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	34.520	

4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6.506	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50.228	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	39	73,58%
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	53	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	16,9 Menit	
6	SOSIAL			
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	118	
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	405	

2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	8.738	
		populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	11.651	

VI. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA.

1) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (EPPD)

Untuk hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Kementerian Dalam Negeri, sampai saat penyusunan Ringkasan ini belum ada rilis dari Kemendagri tentang Hasil EPPD Kabupaten/Kota.

2) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Sebelumnya.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 memperoleh penghargaan capaian kinerja keuangan yang baik ditandai dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2021. Ini merupakan penghargaan capaian keuangan Wajar Tanpa Pengecualian yang ke 7 kalinya.

VII. INOVASI DAERAH.

Berdasarkan Hasil Laporan Inovasi Daerah yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pada Tahun 2021 terdapat beberapa pencapaian Inovasi Daerah yang dilaporkan melalui Indeks Inovasi Daerah yang merupakan hasil penilaian dan pengukuran Kementerian Dalam Negeri terhadap Inovasi yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah secara terukur dan Transparan. Hasil pengukuran ini disampaikan secara elektronik melalui situs web.

Untuk Tahun 2021 Pemerintah Wajo mengajukan 10 Jenis Inovasi, namun yang memenuhi syarat dan masuk kategori sebanyak 5, yaitu :

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI
1	PINISI (Pusat Informasi Perencanaan Berbasis NIK)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wajo	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
2	MASKER PELITA (Masyarakat Keera Peduli Disabilitas)	Puskesmas Keera Kab. Wajo	Inovasi Pelayanan Publik
3	PENTAGRAM (Pelayanan Online Administrasi Kependudukan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo	Inovasi Pelayanan Publik
4	SIPADUPPAI (Layanan Pindah Datang)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo	Inovasi Pelayanan Publik
5	OTO DOTTORO	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik

Sumber : Indeks Inovasi Daerah Kab. Wajo, Bappelitbangda, 2021

VIII. PENGHARGAAN.

Sepanjang Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Wajo berhasil mendapatkan penghargaan pada tingkat Provinsi dan Nasional, diantaranya adalah :

1. Penghargaan Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI
2. Penghargaan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Level 3.
3. Kapabilitas APIP Level 3 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
4. Penghargaan atas keberhasilan Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat Sangat Baik oleh KASN.
5. Penghargaan atas Inovasi Pelayanan Terpadu Penyelesaian Kenaikan Pangkat periode April 2021 PNS Lingkup Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar yang diselenggarakan di Wajo oleh BKN
6. Penghargaan atas Inovasi Pelayanan Terpadu Penyelesaian Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2021 PNS Lingkup Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar yang diselenggarakan di Wajo oleh BKN
7. Penghargaan PINISI Sultan Award sebagai Juara Pertama kategori Pelapor Inovasi Sektor Perindustrian

8. Kategori Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SakiP) dan Kategori Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
9. Penghargaan TOP Digital Awards 2021 (kategori Digital 2021 #Stars 4 yang dimenangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Wajo)
10. Penghargaan Kabupaten Sehat
11. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari KI Sulsel
12. Penghargaan Proklim Tahun 2021
13. Penghargaan program Inovasi dibidang Kesehatan yakni Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wajo sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintahan. Beberapa capaian kinerja pembangunan berdasarkan pendekatan indikator makro yang diperlukan untuk mengukur perkembangan sosial dan ekonomi Kabupaten Wajo berdasarkan kecenderungan (*trend*) beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Kabupaten Wajo bertekad mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih optimal di masa mendatang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mencapai sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Wajo.

Sengkang, 31 Juli 2022

BUPATI WAJO,

Ttd

Dr. H. AMRAN MAHMUD M.Si